



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

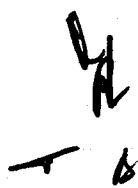
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

U
A
T B

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 13 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 14 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 01 Seri D);

Y
A
A

26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kota Batam Nomor 53);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhan Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 80);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64);



36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 74);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Menara (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 77);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 79);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 81);
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 83);
44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 85);
45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 85);
46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2013

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'M A' with 'A B' below it.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	511.135.469.396,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.069.832.549.717,50
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	87.397.190.906,50
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.668.365.210.019,50

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	671.115.556.257,60
2. Belanja Hibah	Rp.	29.952.544.000,00
3. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	19.324.385.000,00
4. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	899.999.922,51
5. Belanja Tidak terduga	Rp.	4.000.000.000,00
	Rp.	725.292.485.180,11

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	236.856.577.950,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	447.024.680.522,00
3. Belanja Modal	Rp.	357.582.734.915,00
	Rp.	1.041.463.993.387,00

Jumlah Belanja Rp. 1.766.756.478.567,11

Surplus / (Defisit) Rp. (98.391.268.547,61)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	107.391.268.547,61
b. Pengeluaran	Rp.	9.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 98.391.268.547,61

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

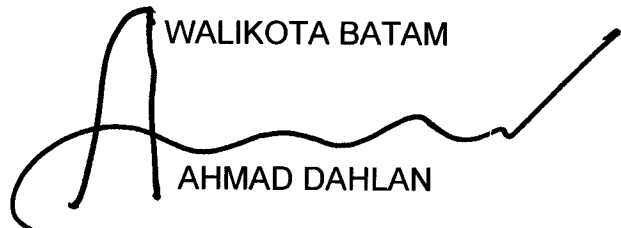


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Batam ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 28 Desember 2012


WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

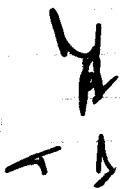
Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 261



NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH
58	Yayasan Cahaya Ummat	Perum. Tiban Indah Permai Blok W1 no. 8 Tiban Indah Kec. Sekupang	100,000,000
59	Yayasan Salimah Kota Batam	Griya Sagulung Permai Blok H No. 83 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung	100,000,000
60	Yayasan Sejahtera Center	Perum. Bonavista Blok J No.05 Kec. Batam Kota	100,000,000
61	Yayasan Birrul Walidain	Perum. Tiban Housing Blok A1 No. 19 Kec. Sekupang	100,000,000
62	Yayasan Insan Harapan	Kota Batam	100,000,000
63	Yayasan Sahabat Juara	Perum. Griya Asri Blok T No. 14 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk	100,000,000
64	Yayasan Ar Ruhama	Tiban Indah Permai Blok V.1 No.1,2 dan 17 Kec. Sekupang	50,000,000
65	Yayasan Baitul A'la	Komp. Aviari Giya Pratama Kel. Buliang Kec. Batu Aji	10,000,000
66	Yayasan Bina Insan Mulia Batam	Jl. Abulyatama No. 03 Kel. Belian Kec. Batam Kota	100,000,000
67	Yayasan Insan Mulia	Bengkong Kolam Mas Blok A No. 28-29 RT.01/RW.19 Kel. Sadai Kec. Bengkong	50,000,000
68	Yayasan Ibnu Khaldun	Bengkong laut RT.02/RW.I Kec. Bengkong	50,000,000
69	Yayasan Insan Madani	Kota Batam	100,000,000

Batam, 28 Desember 2012

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

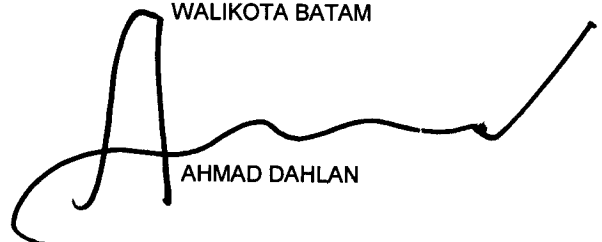
NO	
NO	
NO	
NO	

Handwritten initials and numbers are present in the table cells.

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH
24	PA Birrul Walidain	Perum. New Tiban Housing Blok A1 NO. 19 Kec. Sekupang	43,200,000
25	PA Permate Batam	Perum. Bina Sakinah Blok Mina 1 No. 21 RT.03/RW.XI Tembesi Kec. Sagulung	29,700,000
26	PA Asskinah Annaura	Jl. Ranai No. 45 Bengkong Polisi Kec. Bengkong	22,500,000
27	PA Zeyvanez	Kav. Danau Indah Pungur Blok Cempaka V No.11 RT.01/ Kel. Kabil Kec. Nongsa	19,800,000
28	PA Radmila	Jl. KH. A. Dahlan - Marina View RT.01/RW.X Kel. Tg.Uncang Kec. Batu Aji	19,800,000
29	PA Darul Ikhwan Nahdlatul Wathan	P. Kasu RT.05/RW.02 Kel. Kasu Kec. Belakang Padang	36,000,000
30	PA Nujumul Huda	Jl. KH. A. Dahlan Gg. Mawar 1 No. 50, Kp. Baru RT.01/RW.03 Kel. Tg. Riau Kec. Sekupang	38,700,000
31	PA Hang Tuah	Jl. Ranai No. 11 Bengkonh Polisi Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong	53,100,000
32	Yayasan Rahmatullah	Perum. Garden Muren Pusata Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar	36,000,000
33	PA. Bina Pertiwi "Rubbat Al-Haromain"	Perum. Cluster Puri Legenda Blok A.9 NO.12 dan Blok A.5 NO. 26 Kel. Baloi Permai Ke. Batam Kota	27,000,000
34	PA. Islam Az Zainiyah	Jl. Ahmad Dahlan Tanjung Riau Kec. Sekupang	23,400,000
35	PA. Miftahul Ulum	Perum. Bida Asri I Blok D2 No. 19 Kec. Batam Kota	34,200,000
36	Yayasan Almubarakah Nurhasanah - PA. At Taqwa	Taman Seruni Indah Blok D No. 06 RT.01/RW.04 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota	22,500,000
37	Yayasan Ridho Ilahi Melcem - PA. Yatim Piatu & Dhuafa	Sei Tering I RT.03/RW.06 Tg. Sengkuang	18,000,000
38	Yayasan Pendidikan Yatim Piatu (YPYP)	Perum. Bambu Kuning, Puskopar Blok B5 No. 03 Kec. Batu Aji	9,900,000
39	Yayasan At Tarbiyatul Karim - Panti Asuhan	Jl. Lamongan No. 103 Kampung Durian Kel. Sadai Kec. Bengkong	16,200,000

Batam, 28 Desember 2012

WALIKOTA BATAM

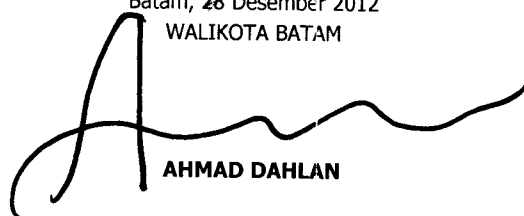


AHMAD DAHLAN

LA
TA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5. 2. 3. 30. 012.	Belanja modal sentolop/senter	2,000,000.00
5. 2. 3. 30. 014.	Belanja Modal Peralatan CCTV	75,000,000.00
5. 2. 3. 30. 015.	Belanja Modal Instalasi Pengaman	25,000,000.00
5. 2. 3. 31.	Belanja Modal Pengadaan Pengaman Tebing dan Pantai	3,018,713,000.00
5. 2. 3. 31. 001.	Belanja Modal Batu Miring	3,018,713,000.00
5. 2. 3. 32.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Jalan	4,671,821,000.00
5. 2. 3. 32. 001.	Belanja Modal Marka Jalan	1,044,500,000.00
5. 2. 3. 32. 005.	Belanja Modal Drainase Jalan	1,251,850,000.00
5. 2. 3. 32. 006.	Belanja Modal Pelengkap Jalan Lainnya	2,375,471,000.00
5. 2. 3. 33.	Belanja Modal Pembuatan Taman	100,000,000.00
5. 2. 3. 33. 001.	Belanja Modal Konstruksi / Pembuatan Taman Kantor	100,000,000.00
5. 2. 3. 36.	Belanja Modal Alat Peraga	3,550,000,000.00
5. 2. 3. 36. 001.	Belanja Alat Peraga Edukatif	3,550,000,000.00
5. 2. 3. 37.	Belanja Modal Peta	700,000,000.00
5. 2. 3. 37. 001.	Belanja Modal Peta Citra Satelit	700,000,000.00
	Jumlah	1,766,756,478,567.11
	Surplus / (Defisit)	(98,391,268,547.61)
6.	PEMBIAYAAN	
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	107,391,268,547.61
6. 1. 1. 09.	Sisa Kas Daerah yang Berasal dari SILPA	103,191,268,547.61
6. 1. 1. 09. 001.	Sisa Kas Daerah di Bank	103,191,268,547.61
6. 1. 5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4,200,000,000.00
6. 1. 5. 01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4,200,000,000.00
6. 1. 5. 01. 001.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4,200,000,000.00
	Jumlah	107,391,268,547.61
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00
6. 2. 2. 02.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2,000,000,000.00
6. 2. 2. 02. 002.	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)	2,000,000,000.00
6. 2. 4.	Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	7,000,000,000.00
6. 2. 4. 04.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	7,000,000,000.00
6. 2. 4. 04. 001.	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	7,000,000,000.00
	Jumlah	9,000,000,000.00
	Pembiayaan neto	98,391,268,547.61
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0

Batam, 28 Desember 2012
WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

MA
AL